

Ujian Tengah Semester

Matakuliah Kebijakan Publik dan Aplikasi

UTS : SOAL B

**Kondisi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**

Oleh

Ahmad Suntara  
NPM. 2526061012



Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung  
2025

## **Kondisi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung**

### **1. Latar Belakang**

Masalah pengelolaan sampah merupakan isu klasik yang dihadapi oleh berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Bandar Lampung. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang meningkat, volume sampah yang dihasilkan setiap hari juga mengalami peningkatan signifikan. Produksi sampah di Kota Bandar Lampung diperkirakan mencapai 600–700 ton per hari, sementara kapasitas pengelolaan dan pengangkutan masih terbatas.

Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak seperti pencemaran lingkungan, konflik sosial di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Meski demikian, isu pengelolaan sampah sering kali belum menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan pemerintah daerah. Melalui pendekatan teori agenda setting, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses terbentuknya isu pengelolaan sampah di Bandar Lampung hingga dapat (atau belum) masuk ke dalam agenda kebijakan publik.

### **2. Kajian Teori**

Teori Agenda Setting pertama kali dikemukakan oleh McCombs dan Shaw (1972) dalam konteks komunikasi massa, yang menjelaskan bahwa media memiliki peran besar dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Dalam konteks kebijakan publik, teori ini kemudian dikembangkan oleh Cobb dan Elder (1971) serta John W. Kingdon (1995) melalui model multiple streams.

Kingdon menjelaskan bahwa munculnya sebuah isu dalam agenda kebijakan dipengaruhi oleh tiga aliran utama, yaitu problem stream (arus masalah), policy stream (arus kebijakan), dan politics stream (arus politik). Ketika ketiganya bertemu pada waktu yang tepat, terbuka sebuah 'policy window' yang memungkinkan isu tersebut masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah.

### **3. Analisis**

Masalah pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung telah lama menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun 2024, produksi sampah kota mencapai 600–700 ton per hari, namun hanya sekitar 70–80% yang dapat terangkut ke TPA Bakung. Sisanya menumpuk di lingkungan pemukiman dan menimbulkan pencemaran. Kondisi TPA Bakung juga telah melebihi kapasitas, menyebabkan pencemaran lindi dan protes dari warga sekitar.

Dalam tahap agenda publik, masyarakat mulai mempersepsikan sampah sebagai masalah penting karena dampaknya langsung terhadap kebersihan, kesehatan,

dan kenyamanan kota. Hal ini diperkuat oleh pemberitaan media lokal seperti Lampost dan Radar Lampung yang secara rutin menyoroti permasalahan sampah di berbagai wilayah. Melalui liputan media dan unggahan di media sosial, tekanan publik terhadap pemerintah meningkat, menandai terbentuknya agenda media yang kuat.

Namun pada tingkat agenda pemerintah perhatian terhadap isu ini masih bersifat reaktif. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mencanangkan program 'Gerakan Bandar Lampung Bersih 2025', namun fokus kebijakan masih didominasi oleh aspek pengangkutan sampah, belum menyentuh pengelolaan terpadu berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) atau circular economy. Padahal berbagai alternatif kebijakan seperti bank sampah, pemilahan di sumber, dan teknologi waste to energy telah tersedia dan diujicobakan di beberapa daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan peraturan dan instansi :

- Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah.
- Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-2002, sampah adalah limbah padat berupa zat organik dan anorganik yang tidak berguna. Pengelolaan sampah diperlukan untuk menghindari bahaya bagi lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
- Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dipakai, digunakan, atau disenangi, yang berasal dari aktivitas manusia.

Berdasarkan penelitian dan ahli :

- Damanhuri dan Tri Padmi (2010), mengidentifikasi kegiatan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu, mulai dari hulu hingga hilir, sebagai suatu sistem yang berkesinambungan.
- Suwerda (2009) dan Suryani (2014), menjelaskan bahwa Bank Sampah didirikan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah oleh warga. Pengelolaan sampah di tingkat komunitas melalui Bank Sampah terbukti berhasil mengatasi masalah lingkungan di wilayah Bantul.
- Dea nisa (2018), mengemukakan bahwa peningkatan kegiatan pemilahan sampah oleh masyarakat merupakan proses yang penting dalam pengelolaan sampah. Pemilahan ini efektif untuk mengurangi volume sampah secara keseluruhan.

## Prinsip-prinsip pengelolaan sampah :

Prinsip-prinsip ini juga sering dikaitkan dengan pandangan ahli dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan:

1. Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle):
  - Reduce (Mengurangi): Meminimalkan produksi sampah dengan mengurangi konsumsi atau penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah.
  - Reuse (Menggunakan Kembali): Menggunakan kembali barang atau sampah yang masih bisa dimanfaatkan.
  - Recycle (Mendaur Ulang): Mengolah kembali sampah menjadi bahan baku baru.
2. Prinsip 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant): Merupakan pengembangan dari prinsip 3R yang menambahkan:
  - Replace (Mengganti): Mengganti barang yang berpotensi menjadi sampah dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan.
  - Replant (Menanam Kembali): Melakukan penanaman kembali sebagai bentuk pelestarian alam.

Jika dianalisis menggunakan model Kingdon, ketiga arus dapat diuraikan sebagai berikut:

- Problem stream: Tumpukan sampah, TPA overload, konflik sosial dan pencemaran lingkungan.
- Policy stream: Solusi kebijakan telah tersedia namun belum diimplementasikan secara optimal.
- Politics stream: Dukungan politik masih terbatas; isu sampah belum menjadi prioritas dibanding isu pembangunan fisik.

Dengan demikian, meskipun masalah pengelolaan sampah telah masuk ke dalam agenda publik dan media, isu ini belum sepenuhnya menjadi agenda prioritas pemerintah daerah. Jendela kebijakan (policy window) baru akan terbuka apabila tekanan publik meningkat dan dukungan politik terhadap isu lingkungan diperkuat, terutama menjelang momentum politik seperti pilkada.

## 4. Tahap Agenda Setting

Tahap	Deskripsi	Aktor Utama	Bukti/Contoh
1. Agenda Publik	Masyarakat melihat masalah sampah sebagai isu utama karena dampaknya langsung terhadap kebersihan, kesehatan, dan citra kota.	Warga, media lokal, LSM lingkungan	Kampanye #BandarLampungBersih, keluhan di media sosial
2. Agenda	Media menyoroti penumpukan sampah	Lampost,	Headline: "TPA Bakung

Tahap	Deskripsi	Aktor Utama	Bukti/Contoh
Media	dan kegagalan sistem TPA. Liputan intens memengaruhi persepsi publik dan tekanan terhadap pemerintah.	Radar Lampung, Tribun Lampung	Penuh, Warga Keluhkan Bau Menyengat”
3. Agenda Pemerintah	Pemerintah Kota memasukkan isu ini dalam RPJMD dan Rencana Strategis DLH. Namun fokus masih pada pengangkutan, belum pada pengelolaan terpadu (3R, circular economy).	DLH, Wali Kota, DPRD	Program “Gerakan Bandar Lampung Bersih 2025”

#### 5. Analisis Menurut Model Kingdon: “Three Streams”

Komponen	Isi	Keterangan
Problem Stream	Tumpukan sampah, kapasitas TPA terbatas, konflik sosial di Bakung.	Masalah jelas terlihat dan dirasakan publik.
Policy Stream	Solusi seperti <i>waste to energy</i> , pemilahan di sumber, bank sampah, sistem pengangkutan berbasis zonasi.	Alternatif sudah ada tapi belum terimplementasi optimal.
Politics Stream	Dukungan politik masih lemah; isu sampah belum jadi prioritas utama dibanding infrastruktur dan transportasi.	Momentum politik (pilkada 2024) bisa menjadi <i>policy window</i> .

#### 6. Faktor yang Mempengaruhi Agenda Setting :

- Tekanan media dan opini publik – mendorong pemerintah untuk merespons cepat.
- Kepentingan politik dan citra daerah – kebersihan kota berpengaruh terhadap elektabilitas pejabat.
- Dukungan aktor kebijakan – DPRD, DLH, dan komunitas lingkungan menentukan keberlanjutan program.
- Sumber daya dan pendanaan – keterbatasan APBD menjadi hambatan utama.
- Intervensi pusat – program nasional seperti *Jakstranas Pengelolaan Sampah* memberi arah kebijakan lokal.

Masalah pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung telah masuk ke agenda publik dan media, tetapi belum sepenuhnya menjadi agenda prioritas pemerintah. Proses *agenda setting* masih terhambat oleh:

1. kurangnya tekanan politik berkelanjutan,
2. lemahnya koordinasi lintas sektor, dan
3. belum adanya kebijakan inovatif jangka panjang.

Namun dengan meningkatnya kesadaran publik dan liputan media, peluang untuk membuka *policy window* semakin besar terutama jika pemerintah kota dapat:

1. Memperkuat regulasi pengelolaan sampah terpadu,
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dan
3. Mengadopsi teknologi ramah lingkungan (*waste to energy* atau *zero waste city*).

## 7. Kesimpulan

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa proses agenda setting terhadap masalah pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa isu ini telah mendapatkan perhatian signifikan dari masyarakat dan media. Namun, lemahnya dukungan politik, terbatasnya sumber daya, serta minimnya inovasi kebijakan menyebabkan isu ini belum masuk ke dalam agenda prioritas pemerintah daerah. Agar isu ini dapat menjadi fokus kebijakan, diperlukan langkah-langkah strategis seperti memperkuat regulasi pengelolaan sampah terpadu, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas menjadi kunci untuk mendorong keberlanjutan pengelolaan sampah di Bandar Lampung.

## Daftar Pustaka

Cobb, R. W., & Elder, C. D. (1971). The Politics of Agenda-Building: An Alternative Perspective for Modern Democratic Theory. *The Journal of Politics*, 33(4), 892–915.

Kingdon, J. W. (1995). *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (2nd ed.). HarperCollins.

McCombs, M., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. (2024). *Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung*.

Radar Lampung. (2024). 'TPA Bakung Penuh, Warga Keluhkan Bau Menyengat.' *Radar Lampung Online*.

Jurnal :

KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
BERDASARKAN SUDUT PANDANG PEMERINTAH

Fadiyah Izzah Ajrina<sup>1</sup>, Husna Tiara Putri, S.T., M.T.<sup>2</sup>,

Dr. Sri Maryati, S.T., M.I.P.<sup>3</sup>

Institut Teknologi Sumatera, Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung,

Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365

1Email : [fadiyahizzaha@gmail.com](mailto:fadiyahizzaha@gmail.com)

Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) Vol. 3 No. 2 (2022) : Oktober  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BAGI WARGA DI  
KELURAHAN BAKUNG KOTA BANDAR LAMPUNG

Cahya Sujatmiko<sup>\*1</sup>, Farida Juwita<sup>2</sup>, Wisnaningsih<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

e-mail: <sup>\*1</sup>cahyasujatmiko@gmail.com, <sup>2</sup>ida.juwitaft@gmail.com,

<sup>3</sup>wisnaningsih@gmail.com